

Vol. 6 No. 1 (2025), Halaman 26-42



GEOGRAPHIA

Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi

ISSN: 2774-6968

FERTILITAS DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023: DEMOGRAFI, SOSIAL DAN EKONOMI

Seri Aryati^{1*}, Sukamdi², Umi Listyaningsih³

^{1*}Program Studi Doktor Ilmu Geografi Universitas Gadjah Mada, Indonesia

¹²³Departemen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: seri.aryati@ugm.ac.id^{1*}, sukamdi@ugm.ac.id², umilis@ugm.ac.id³

Website Jurnal: <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/geographia>



Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI: 10.53682/gjppg.v6i1.10341

(Diterima: 01-10-2024; Direvisi: 03-01-2025; Disetujui: 01-06-2025)

ABSTRACT

This paper examines fertility in Sleman Regency, Yogyakarta, with a focus on socio-demographic and economic factors. Sleman, a region of strategic significance within the Special Region of Yogyakarta, exhibits unique demographic characteristics that warrant further analysis, particularly in relation to fertility rates. The study highlights the impact of factors such as age at first marriage, ideal number of children, live births, education, employment, contraceptive use, and reasons for not using family planning. Utilizing secondary data from the 2023 Family Survey and Update conducted by BKKBN, the study finds that most residents prefer smaller families, with two children considered ideal. This paper also emphasizes the crucial role of access to healthcare services in shaping fertility patterns. The findings provide valuable insights into local demographic dynamics and offer guidance for policy development aimed at managing population growth and promoting sustainable development.

Keywords: Demographic, Family planning, Fertility.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji fertilitas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan fokus pada faktor-faktor sosio-demografis dan ekonomi. Sleman, sebagai wilayah yang memiliki arti strategis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan karakteristik demografis yang unik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut, terutama terkait dengan tingkat fertilitas. Penelitian ini menyoroti dampak faktor-faktor seperti usia saat pernikahan pertama, anak ideal yang diinginkan, anak lahir hidup (ALH), pendidikan, pekerjaan, pemakaian kontrasepsi, serta alasan tidak berKB. Dengan menggunakan data sekunder dari pendataan Keluarga dan pemutakhiran tahun 2023 yang dilakukan oleh BKKBN. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar penduduk lebih memilih keluarga kecil, dengan dua anak dianggap sebagai jumlah ideal. Tulisan ini juga menekankan peran penting akses terhadap layanan kesehatan dalam membentuk pola fertilitas. Temuan ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika demografis lokal dan menawarkan panduan untuk pengembangan kebijakan yang bertujuan mengelola pertumbuhan penduduk serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Sleman.

Kata Kunci: Kelahiran, Keluarga Berencana, Kependudukan

PENDAHULUAN

Fertilitas merupakan salah satu komponen penting dalam dinamika demografi yang memengaruhi pertumbuhan dan struktur penduduk suatu wilayah ([Bongaarts 1978](#)). Kabupaten Sleman, sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan karakteristik demografi yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks fertilitas. Kondisi fertilitas di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi demografi, sosial, maupun ekonomi ([McNicoll 1994](#)).

Secara demografi, Kabupaten Sleman memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif stabil, dengan distribusi penduduk yang bervariasi antar kecamatan ([Central Bureau of Statistics, 2022](#)). Faktor-faktor seperti usia kawin pertama, dan preferensi jumlah anak berkontribusi signifikan terhadap tingkat fertilitas di daerah ini ([Casterline, J. B., & Trussell 1980](#)). Sementara itu, faktor sosial seperti tingkat pendidikan, norma budaya, dan peran gender juga memengaruhi keputusan reproduktif individu dan pasangan di Sleman ([Caldwell 1982](#)). Pendidikan, misalnya, sering kali berkorelasi negatif dengan tingkat fertilitas, di mana individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung menunda pernikahan dan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit ([Martin 1995](#)).

Dari sisi ekonomi, status ekonomi keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, serta partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menjadi variabel kunci yang turut menentukan tingkat fertilitas ([Becker 1981](#)). Kabupaten Sleman, dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, menunjukkan pola fertilitas yang unik dibandingkan daerah lain di Yogyakarta. Pendapatan keluarga yang lebih tinggi sering kali diiringi dengan peningkatan akses terhadap kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi, yang dapat menurunkan tingkat fertilitas ([Cleland, J., Bernstein, S., Ezeh, A., Faundes, A., Glasier, A., & Innis 2006](#)).

Angka fertilitas yang terus menurun secara global telah menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian, terutama di negara-negara maju. Fenomena fertilitas rendah, yang didefinisikan sebagai tingkat fertilitas total (TFR) di bawah level pengganti sebesar 2,1 anak per wanita, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi dan budaya. Beberapa studi telah mengidentifikasi faktor-faktor kunci

seperti peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja, penundaan usia pernikahan, dan meningkatnya biaya untuk membesarkan anak sebagai penyebab utama dari penurunan ini ([Jones, G., & Gubhaju 2017](#)); ([Kohler, H. P., Billari, F. C., & Ortega 2006](#)). Selain itu, tingkat pendidikan, khususnya di kalangan wanita, juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi keputusan terkait fertilitas ([Lutz, W., Testa, M. R., & Penn 2006](#)). Namun, meskipun faktor-faktor ini memberikan pemahaman umum, interaksi antara faktor-faktor tersebut dan pengaruhnya terhadap fertilitas bervariasi di berbagai konteks sosial budaya, sehingga studi spesifik per wilayah menjadi penting ([Balbo, N., Billari, F. C., & Mills 2013](#)); ([Bongaarts 2017](#)).

Dalam beberapa dekade terakhir, Yogyakarta telah mengalami penurunan tingkat fertilitas yang signifikan, sejalan dengan tren global yang terjadi di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan sosial dan ekonomi, peningkatan tingkat pendidikan, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja ([Bongaarts 2017](#)); ([McDonald 2020](#)). Selain itu, akses yang lebih luas terhadap metode kontrasepsi modern dan perubahan preferensi keluarga menuju keluarga kecil juga memainkan peran penting dalam penurunan angka kelahiran ([UNFPA 2019](#)); ([Gubhaju 2019](#)). Meningkatnya usia pernikahan pertama menjadi faktor tambahan yang berkontribusi pada rendahnya tingkat fertilitas di wilayah ini ([Jones, G., & Gubhaju 2017](#)). Dampaknya, Yogyakarta menghadapi tantangan demografis yang dapat mempengaruhi struktur populasi dan pembangunan ekonomi di masa depan ([Sullivan 2019](#)).

Namun, meskipun tren penurunan fertilitas ini telah diidentifikasi secara umum, terdapat kesenjangan dalam pemahaman mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor spesifik di Yogyakarta mempengaruhi fenomena ini. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek makro seperti kebijakan keluarga berencana nasional, tetapi kurang memperhatikan dinamika lokal yang unik di Yogyakarta, termasuk faktor budaya, struktur keluarga, dan preferensi individu ([Hull 2021](#)). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dinamika spesifik yang terjadi di Yogyakarta dalam konteks penurunan fertilitas ini ([Jayaweera & Mishra 2020](#)); ([Firman 2018](#)).

Penelitian ini juga memiliki kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur tentang fertilitas rendah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan seperti Yogyakarta yang mungkin memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan daerah lain. Dengan memahami tren fertilitas rendah ini, strategi yang lebih efektif dapat disusun untuk mengatasi tantangan demografis yang muncul akibat perubahan struktur populasi di Yogyakarta ([Firman 2018](#)); ([Hull 2021](#)). Strategi-strategi ini diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini, serta memastikan kesejahteraan sosial di masa depan ([Jayaweera & Mishra 2020](#)).

Salah satu kerangka teoretis utama yang digunakan untuk menganalisis fertilitas rendah adalah teori *new home economics*, yang menyatakan bahwa peningkatan pendidikan dan pekerjaan wanita menyebabkan penurunan fertilitas karena meningkatnya biaya kesempatan untuk memiliki anak ([Becker 1960](#)); ([Mincer 1963](#)). Teori ini sangat berguna dalam menjelaskan penurunan fertilitas di negara-negara maju di mana wanita memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan peluang karier. Namun, teori ini dikritik karena terlalu menyederhanakan hubungan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga serta tidak memperhitungkan faktor sosial dan budaya yang juga memengaruhi keputusan fertilitas ([Bernardi 2016](#)); ([Morgan and Tailor 2006](#)). Meskipun demikian, perspektif ekonomi ini tetap penting untuk memahami tren fertilitas, terutama jika dikombinasikan dengan teori-teori lain yang mengatasi kelemahannya.

Sebaliknya, teori-teori sosiokultural menekankan peran norma-norma gender, kebijakan keluarga, dan ekspektasi sosial dalam membentuk perilaku fertilitas ([McDonald 2020](#)); ([Esping-Andersen 2009](#)). Teori-teori ini menekankan bahwa keputusan fertilitas tidak dibuat dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekspektasi budaya. Sebagai contoh, ([McDonald 2020](#)) berpendapat bahwa dalam masyarakat di mana kesetaraan gender lebih tinggi dalam pendidikan dan pekerjaan tetapi lebih rendah dalam lingkup keluarga, tingkat fertilitas cenderung lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konflik antara peran kerja dan keluarga, yang mengakibatkan penundaan atau pengurangan kelahiran. Perspektif sosiokultural

ini memberikan pandangan yang lebih holistik tentang keputusan fertilitas dengan memasukkan pengaruh norma sosial dan kebijakan, yang sering diabaikan dalam model ekonomi murni ([Goldscheider and Lappegard 2015](#)); ([Balbo, N., Billari, F. C., & Mills 2013](#)).

Akhirnya, teori transisi demografis menawarkan kerangka kerja yang luas untuk memahami penurunan fertilitas dalam konteks perubahan sosial yang lebih luas ([Notestein 1953](#)); ([Kirk 1996](#)). Menurut teori ini, penurunan fertilitas merupakan bagian dari proses modernisasi masyarakat yang meliputi perubahan dalam tingkat kematian, perkembangan ekonomi, dan struktur sosial. Seiring dengan transisi masyarakat dari ekonomi agraris ke ekonomi industri, tingkat fertilitas biasanya menurun karena perubahan dalam struktur keluarga, biaya membesarkan anak, dan akses ke perencanaan keluarga ([Lesthaeghe 2010](#)); ([Caldwell 1982](#)). Meskipun teori transisi demografis menyediakan perspektif makro yang berguna, teori ini sering dikritik karena pandangannya yang deterministik dan kurang mampu menjelaskan variasi penurunan fertilitas di berbagai wilayah dan budaya ([Bongaarts 2017](#)); ([Dyson 2010](#)). Namun pada analisis kali ini, peneliti tidak membahas faktor budaya yang ada di kabupaten Sleman Yogyakarta.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam analisis fertilitas di Kabupaten Sleman dengan menekankan pada dinamika sosio-ekonomi dan demografi yang unik di wilayah ini. Kebanyakan penelitian sebelumnya berfokus pada data fertilitas pada tingkat nasional, namun penelitian ini menambahkan kontribusi penting dengan mengintegrasikan data lokal yang lebih rinci, khususnya tentang dampak tingkat pendidikan, pekerjaan, dan akses kesehatan terhadap keputusan reproduktif individu. Temuan bahwa sebagian besar masyarakat Sleman menganggap dua anak sebagai jumlah ideal mencerminkan hasil program keluarga berencana nasional, namun dengan variasi kontekstual yang khas di tingkat lokal.

Penelitian ini juga memperkenalkan kebaruan dalam pendekatannya terhadap interaksi antara faktor ekonomi dan keputusan reproduktif. Melalui penggunaan data sekunder dari Pendataan Keluarga BKKBN 2023, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor seperti pendapatan keluarga dan

partisipasi perempuan dalam angkatan kerja berkontribusi pada penurunan angka kelahiran. Dengan mengaitkan data ini dengan teori ekonomi keluarga, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam memahami tren fertilitas rendah yang tidak hanya didorong oleh faktor demografis tetapi juga oleh dinamika ekonomi yang berkembang di Kabupaten Sleman.

Salah satu kebaruan penelitian ini adalah penekanannya pada fenomena preferensi keluarga kecil yang kuat di daerah perkotaan seperti Sleman, yang mengalami urbanisasi cepat. Hal ini penting karena menambah dimensi baru pada penelitian fertilitas di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah yang mengalami urbanisasi, di mana preferensi dua anak menjadi norma, sejalan dengan teori transisi demografis. Ini menunjukkan pergeseran nilai-nilai tradisional menuju modernitas, yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya.

Penelitian ini juga memunculkan kebaruan dalam kaitannya dengan peran akses terhadap layanan kesehatan dalam membentuk pola fertilitas. Meskipun banyak studi telah mengakui pentingnya layanan kesehatan, penelitian ini memberikan analisis yang lebih rinci tentang bagaimana akses terhadap layanan kontrasepsi dan pengetahuan kesehatan reproduksi berdampak langsung pada preferensi keluarga dan jumlah anak yang diinginkan.

Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang multi-dimensi, di mana faktor demografi, sosial, ekonomi, dan kesehatan diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas di Sleman. Ini adalah langkah penting dalam literatur fertilitas, yang sering kali terpisah-pisah dalam analisis sektoral. Dengan menggunakan data komprehensif dari BKKBN, penelitian ini memperkaya literatur tentang bagaimana faktor-faktor lokal spesifik memengaruhi keputusan fertilitas di Indonesia.

Dengan memahami dinamika spesifik yang mempengaruhi fertilitas di Sleman, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur fertilitas di Indonesia, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah untuk menangani tantangan demografis di wilayah perkotaan yang sedang tumbuh pesat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya perencanaan pembangunan yang

berkelanjutan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman dan daerah serupa lainnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pola yang terdapat dalam data sekunder yang telah tersedia, yang mencakup berbagai indikator kependudukan dan keluarga berencana yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder diambil dari sumber-sumber yang sudah dipublikasikan yang berasal dari Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran BKKBN. Indikator yang digunakan ialah usia kawin pertama, anak ideal yang diinginkan, anak lahir hidup (ALH), pendidikan, pekerjaan, pemakaian kontrasepsi, serta alasan tidak berKB. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan melalui grafik yang disusun berdasarkan teori-teori yang mendasari penelitian.

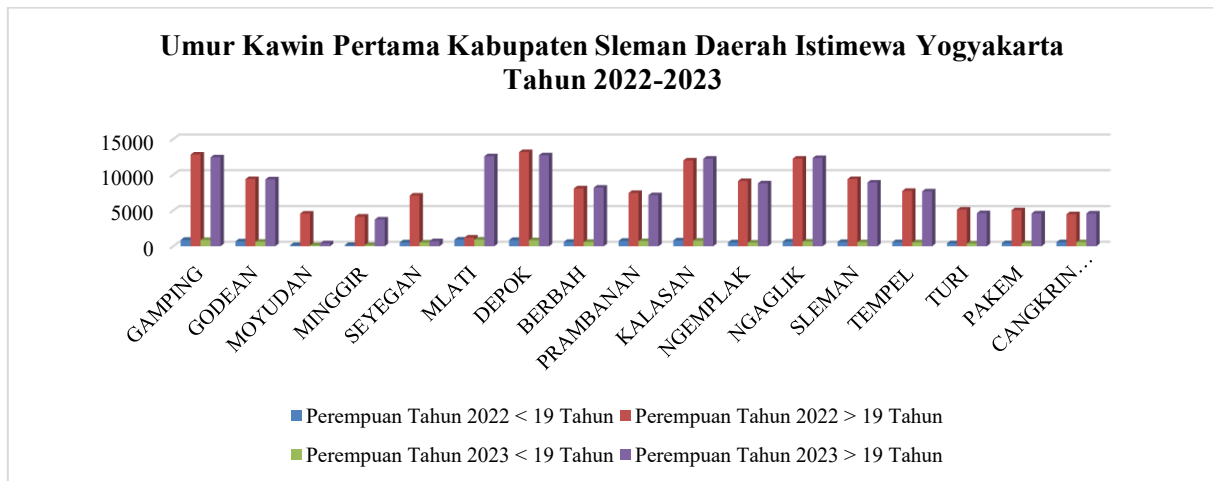
HASIL DAN PEMBAHASAN

Usia Perkawinan

Sebagian besar perempuan di Kabupaten Sleman menikah pada usia di atas 19 tahun, baik pada tahun 2022 maupun 2023. Hal ini terlihat dari dominasi bar warna oranye (perempuan tahun 2022 > 19 tahun) dan kuning (perempuan tahun 2023 > 19 tahun) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bar warna biru (perempuan tahun 2022 < 19 tahun) dan abu-abu (perempuan tahun 2023 < 19 tahun).

Kecamatan Depok, Ngaglik, dan Sleman menunjukkan jumlah pernikahan perempuan di atas 19 tahun yang sangat signifikan, dengan jumlah yang mencapai lebih dari 10.000 orang pada kedua tahun tersebut. Sementara itu, kecamatan-kecamatan seperti Minggir, Cangkringan, dan Pakem menunjukkan jumlah pernikahan yang jauh lebih sedikit, baik untuk kategori di bawah 19 tahun maupun di atas 19 tahun.

Pada tahun 2023, terlihat ada peningkatan kecil dalam jumlah perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun dibandingkan dengan tahun 2022 di beberapa kecamatan seperti Gamping dan Prambanan, meskipun jumlahnya tetap relatif rendah dibandingkan dengan kelompok usia di atas 19 tahun. Data usia perkawinan dilihat pada [Gambar 1](#).



Gambar 1. Umur Kawin Pertama Kabupaten Sleman, 2023 (BKKBN Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Tahun 2023)

Secara sosiologis, pergeseran usia menikah ke arah yang lebih tua dapat dikaitkan dengan peningkatan tingkat pendidikan dan perubahan norma sosial yang menekankan pada pentingnya kemandirian dan pengembangan diri sebelum menikah. Menurut teori modernisasi, masyarakat yang mengalami peningkatan akses pendidikan dan pekerjaan cenderung mengalami penundaan dalam usia perkawinan karena prioritas terhadap karir dan pendidikan (Goode 1963).

Selain itu, penurunan pernikahan di bawah usia 19 tahun dapat dianggap sebagai hasil dari kampanye pemerintah dan organisasi masyarakat yang menekankan bahaya pernikahan dini, baik dari segi kesehatan reproduksi maupun sosial ekonomi (BKKBN 2020). Teori transisi demografis juga mendukung temuan ini, di mana perubahan dalam struktur umur perkawinan sering kali menjadi tanda dari tahap akhir transisi demografis yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan pernikahan dini (Notestein 1953).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Kabupaten Sleman menikah di atas usia 19 tahun, sejalan dengan tren global penundaan usia pernikahan di kalangan perempuan berpendidikan tinggi. Temuan ini mendukung teori *new home economics* yang dikemukakan oleh (Becker 1960), yang menyatakan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan angkatan kerja menurunkan fertilitas melalui penundaan pernikahan. Secara implikatif, hasil ini juga menunjukkan pengaruh modernisasi, sebagaimana dikemukakan oleh (Goode 1963),

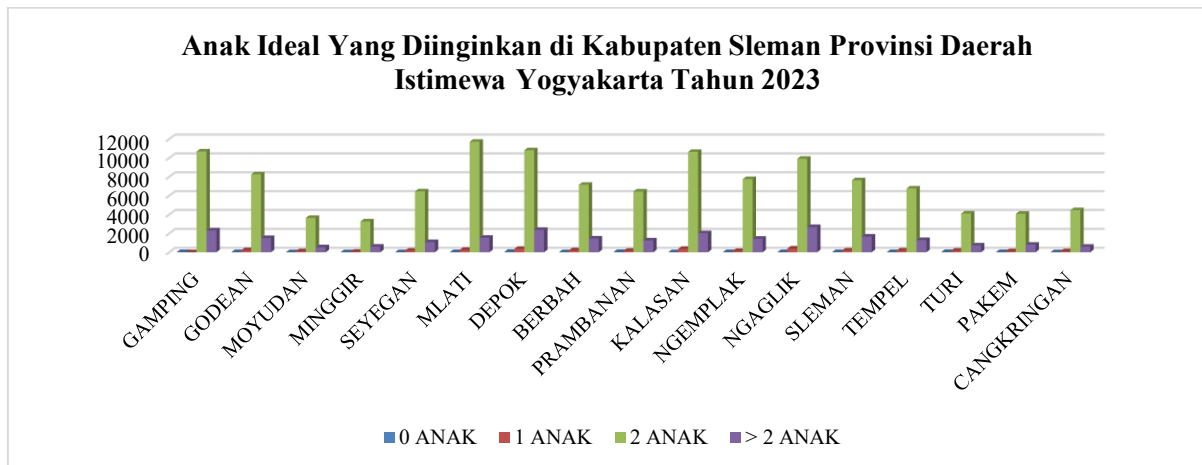
yang menekankan bahwa masyarakat yang lebih terdidik cenderung menunda pernikahan dan fokus pada stabilitas ekonomi terlebih dahulu sebelum memulai keluarga.

Penemuan ini menguatkan relevansi teori modernisasi dalam konteks transisi sosial dan ekonomi di Sleman, di mana pendidikan dan kesadaran akan peran perempuan dalam masyarakat menyebabkan penurunan fertilitas melalui penundaan usia pernikahan. Pemerintah daerah perlu terus mendorong program edukasi dan penyuluhan terkait pernikahan dini dan kesejahteraan ekonomi untuk mendukung pengurangan angka pernikahan di bawah usia 19 tahun, yang masih terjadi di beberapa kecamatan.

Preferensi Jumlah Anak

Preferensi jumlah anak ideal di berbagai kecamatan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2023. Data ini mengkategorikan jumlah anak ideal menjadi empat kelompok: 0 anak, 1 anak, 2 anak, dan lebih dari 2 anak. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa mayoritas penduduk di setiap kecamatan cenderung memilih memiliki 2 anak sebagai jumlah anak ideal, yang ditunjukkan oleh bar abu-abu yang dominan di hampir semua kecamatan. Data preferensi anak dilihat pada Gambar 2.

Kecamatan Mlati, Gamping, Depok dan Kalasan memiliki jumlah penduduk terbanyak yang menginginkan 2 anak, dengan angka yang cukup signifikan melebihi 10.000 orang. Hal ini mungkin mencerminkan pengaruh program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan di Indonesia yang menekankan bahwa memiliki dua anak cukup (Sugiharjo 2000).



Gambar 2. Anak Ideal Yang Diinginkan di Kabupaten Sleman, 2023 BKKBN Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Tahun 2023

Selain itu, pilihan untuk memiliki lebih dari 2 anak juga masih terlihat cukup kuat di beberapa kecamatan seperti Ngaglik dan Depok. Ini mungkin mencerminkan norma budaya lokal atau kondisi sosial-ekonomi tertentu di wilayah tersebut yang masih mendukung keluarga besar (Caldwell 1982).

Sebaliknya, keinginan untuk memiliki hanya 1 anak atau tidak memiliki anak sama sekali tampaknya tidak populer, dengan angka yang relatif rendah di semua kecamatan. Ini bisa jadi mencerminkan adanya nilai-nilai tradisional yang masih kuat di kalangan masyarakat Sleman, di mana memiliki keturunan dianggap penting (Martin 1995).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa variasi antar kecamatan, pola umum yang mendominasi adalah preferensi untuk memiliki 2 anak, yang sejalan dengan kebijakan nasional mengenai keluarga ideal. Ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perubahan sosial dan ekonomi, norma yang terkait dengan ukuran keluarga tetap bertahan di banyak bagian Sleman.

Sebagian besar penduduk Sleman menyatakan bahwa dua anak adalah jumlah ideal, yang konsisten dengan kebijakan keluarga berencana nasional. Preferensi ini mencerminkan efektivitas program keluarga berencana dalam mengarahkan masyarakat untuk membatasi jumlah anak, dan hal ini sejalan dengan teori transisi demografis yang menegaskan bahwa masyarakat yang berada pada tahap akhir transisi demografis akan menyesuaikan jumlah kelahiran dengan tingkat penggantian (Notestein 1953). Selain itu, teori

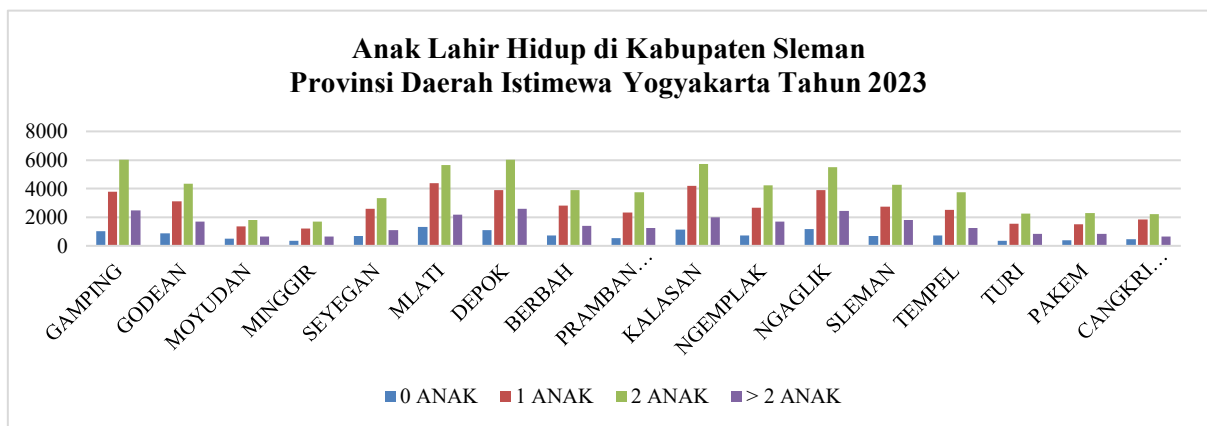
sosio-kultural (McDonald 2020) juga relevan dalam menjelaskan bagaimana norma-norma sosial dan peran gender memengaruhi keputusan reproduktif dalam masyarakat yang lebih modern.

Temuan ini mendukung teori transisi demografis dan sosio-kultural, yang menekankan bahwa norma gender dan perkembangan ekonomi dapat mengurangi fertilitas melalui preferensi keluarga kecil. Program keluarga berencana harus terus diperkuat dengan mempromosikan nilai keluarga kecil di wilayah-wilayah yang masih menunjukkan preferensi untuk memiliki lebih dari dua anak, khususnya di daerah dengan tradisi budaya yang kuat.

Distribusi Jumlah Anak Lahir Hidup

Grafik pada Gambar 3 menggambarkan distribusi jumlah anak lahir hidup di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk tahun 2023. Grafik ini membagi data ke dalam empat kategori: tanpa anak (0 anak), satu anak (1 anak), dua anak (2 anak), dan lebih dari dua anak (> 2 anak) di berbagai kecamatan.

Sebagian besar keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 memiliki satu anak atau dua anak. Hal ini terlihat dari dominasi bar berwarna abu-abu (2 anak) dan oranye (1 anak) yang lebih tinggi di sebagian besar kecamatan. Kecamatan seperti Depok, Ngaglik, dan Kalasan memiliki jumlah keluarga dengan satu anak atau dua anak yang paling banyak, mencapai lebih dari 5.000 kasus. Ini mengindikasikan kecenderungan masyarakat di wilayah-wilayah ini untuk memiliki keluarga kecil dengan satu atau dua anak.



Gambar 3. Anak Lahir Hidup di Kabupaten Sleman, 2023 (BKKBN Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Tahun 2023)

Sebaliknya, kategori tanpa anak (0 anak) memiliki jumlah yang paling rendah di hampir semua kecamatan, dengan bar biru yang sangat pendek. Ini menunjukkan bahwa kejadian keluarga tanpa anak jauh lebih sedikit dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anak. Kecamatan yang memiliki jumlah tertinggi dalam kategori ini adalah Mlati dan Kalasan, meskipun angkanya tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan kategori lainnya.

Tingginya angka keluarga dengan dua anak mungkin mencerminkan norma sosial yang berlaku di masyarakat Kabupaten Sleman, di mana memiliki dua anak sering dianggap sebagai ukuran keluarga yang ideal. Menurut teori transisi demografis, masyarakat yang berada pada tahap transisi kedua cenderung mengurangi jumlah kelahiran hingga mencapai stabilitas pada tingkat penggantian, yang sering kali tercermin dalam preferensi untuk memiliki dua anak (Notestein 1953).

Tingginya angka keluarga dengan satu anak di Kabupaten Sleman dapat mencerminkan perubahan dalam pola pikir masyarakat yang mungkin lebih memilih untuk membatasi jumlah anak. Hal ini bisa berkaitan dengan meningkatnya biaya hidup, perhatian terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan anak, serta aspirasi sosial-ekonomi yang lebih tinggi yang menekankan pada memiliki satu anak yang dapat diberi perhatian dan sumber daya yang maksimal (Becker 1981).

Teori transisi demografis juga relevan dalam konteks ini, di mana masyarakat yang berada dalam tahap akhir transisi sering kali menunjukkan penurunan angka kelahiran karena prioritas terhadap kualitas hidup dari pada kuantitas anak (Notestein 1953). Selain

itu, program keluarga berencana yang efektif juga mungkin berkontribusi pada preferensi untuk memiliki satu anak, terutama di daerah perkotaan dan semi-urban seperti Kabupaten Sleman (BKKBN 2020).

Tingginya angka keluarga dengan dua anak juga bisa dikaitkan dengan keberhasilan program keluarga berencana yang mendorong keluarga untuk membatasi jumlah anak demi kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik (BKKBN 2020). Namun, tingginya angka keluarga dengan lebih dari dua anak di beberapa kecamatan mungkin juga menunjukkan bahwa masih ada segmen populasi yang memilih atau merasa perlu memiliki lebih banyak anak, yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, atau keterbatasan akses ke layanan kesehatan reproduksi.

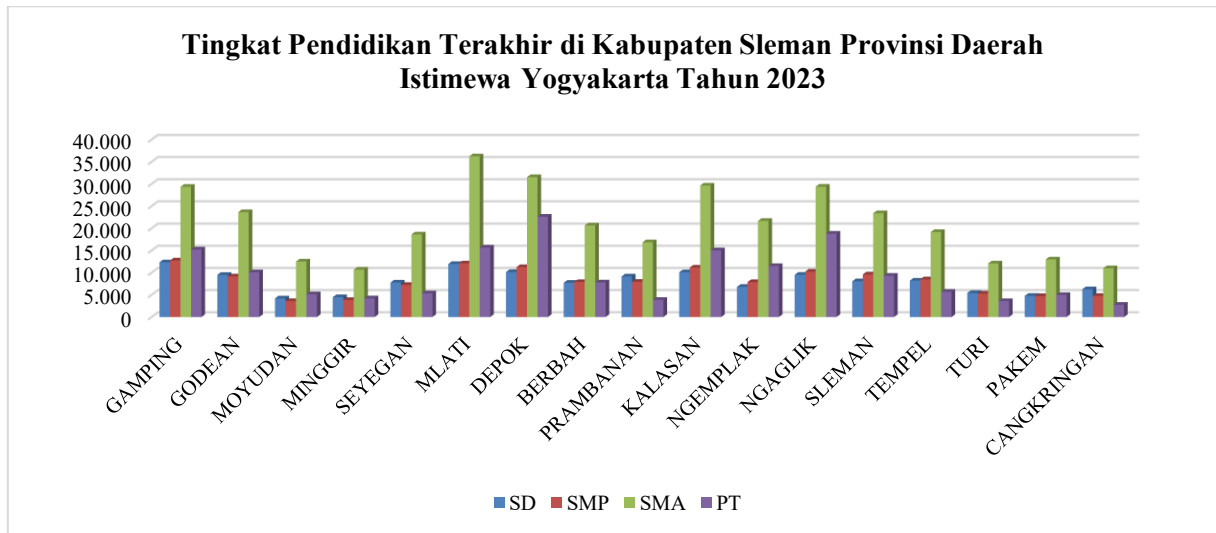
Mayoritas keluarga di Sleman memiliki satu atau dua anak, yang mengindikasikan bahwa masyarakat lebih memilih untuk membatasi jumlah anak seiring dengan meningkatnya kesadaran akan biaya hidup dan pentingnya pendidikan serta kesehatan anak. Hal ini mendukung teori *new home economics*, di mana peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan pendidikan mengurangi jumlah kelahiran karena meningkatnya biaya kesempatan untuk memiliki anak (Becker 1960). Hasil ini juga sejalan dengan teori transisi demografis, yang menyatakan bahwa masyarakat yang berada dalam tahap akhir transisi cenderung menunjukkan penurunan angka kelahiran karena prioritas pada kualitas hidup (Notestein 1953).

Hasil ini memperkuat teori *new home economics* dan transisi demografis, yang

menggarisbawahi bahwa penurunan fertilitas di Sleman lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi dan perubahan aspirasi keluarga dalam masyarakat yang mengalami modernisasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan akses yang lebih luas ke layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan anak agar masyarakat dapat terus berfokus pada kualitas hidup melalui keluarga kecil.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan tersebut dibagi ke dalam empat kategori: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Pendidikan Tinggi (PT). Grafik Gambar 4 menunjukkan distribusi tingkat pendidikan terakhir yang dicapai oleh penduduk di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2023.



Gambar 4. Tingkat Pendidikan Terakhir di Kabupaten Sleman, 2023 (BKKBN Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Tahun 2023)

Dari grafik [Gambar 4](#), dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, yang ditunjukkan oleh bar berwarna abu-abu yang mendominasi di hampir semua kecamatan. Kecamatan Depok, Ngaglik, dan Sleman memiliki jumlah penduduk lulusan SMA yang paling tinggi, dengan angka mencapai lebih dari 30.000 orang di masing-masing kecamatan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menengah atas adalah tingkat pendidikan terakhir yang paling umum di Kabupaten Sleman.

Selain itu, pendidikan tinggi (PT), yang ditandai dengan bar kuning, juga memiliki angka yang signifikan, terutama di kecamatan-kecamatan seperti Mlati, Depok, dan Ngaglik. Tingginya jumlah lulusan pendidikan tinggi di kecamatan-kecamatan ini dapat mengindikasikan akses yang lebih baik ke institusi pendidikan tinggi serta adanya konsentrasi penduduk dengan latar belakang sosial-ekonomi yang mendukung pendidikan lebih lanjut.

Sebaliknya, jumlah penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat SD dan

SMP (ditunjukkan oleh bar biru dan merah) relatif lebih rendah. Ini mungkin mencerminkan peningkatan akses ke pendidikan menengah dan tinggi seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang hanya mencapai pendidikan dasar (SD) atau menengah pertama (SMP) terendah adalah kecamatan seperti Moyudan dan Minggir, meskipun jumlahnya tetap lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA dan PT di kecamatan-kecamatan lain.

Distribusi tingkat pendidikan ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori modal manusia yang diajukan oleh [\(Becker 1964\)](#), yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas individu dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tingginya jumlah lulusan SMA dan PT di Kabupaten Sleman mengindikasikan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan untuk meningkatkan peluang karir dan pendapatan.

Teori modernisasi juga relevan di sini, di mana pendidikan dianggap sebagai pendorong utama untuk modernisasi sosial dan ekonomi [\(Inkeles and Smith 1974\)](#). Dengan semakin

banyaknya penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi, Kabupaten Sleman dapat mengalami perubahan dalam struktur sosialnya, di mana masyarakat semakin mengutamakan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial.

Selain itu, fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti wajib belajar 12 tahun dan perluasan akses ke perguruan tinggi melalui beasiswa dan program bantuan lainnya (Kemdikbud 2019). Kebijakan-kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah dan tinggi.

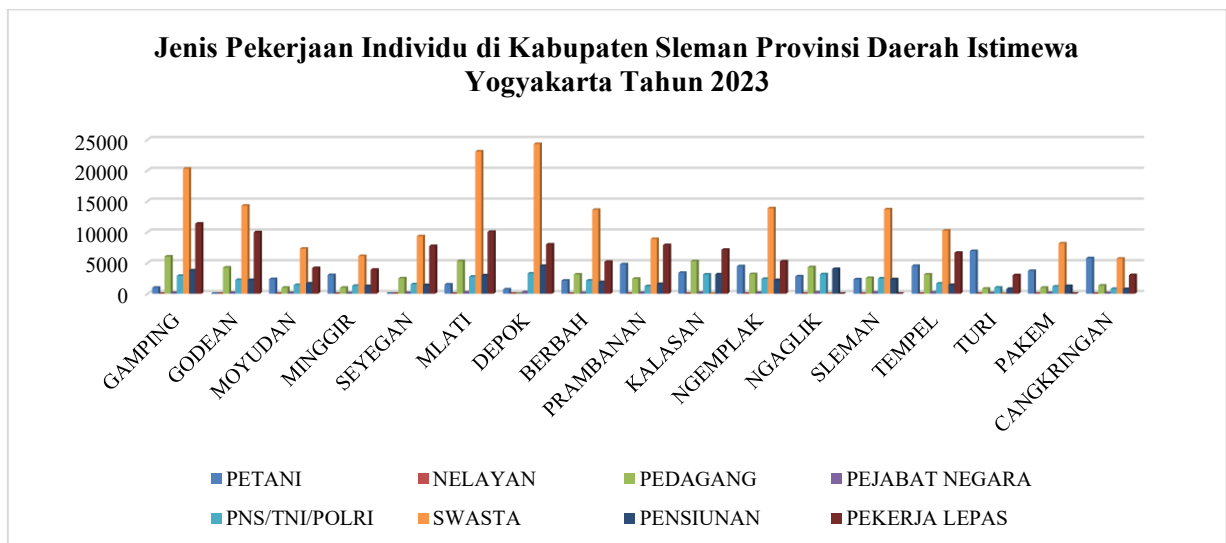
Tingkat pendidikan di Sleman menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA), dengan jumlah yang signifikan juga menyelesaikan pendidikan tinggi. Ini mendukung teori modal manusia (Becker 1964), yang menekankan bahwa pendidikan adalah investasi yang meningkatkan produktivitas individu. Pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan penurunan fertilitas, sebagaimana

dikonfirmasi oleh hasil ini, di mana pendidikan memainkan peran penting dalam menunda usia kawin pertama dan menurunkan jumlah anak yang diinginkan.

Penemuan ini memperkuat teori modal manusia dan menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam keputusan reproduktif, yang menurunkan fertilitas melalui peningkatan aspirasi ekonomi dan sosial. Kebijakan wajib belajar dan peningkatan akses ke pendidikan tinggi perlu terus didorong untuk mempertahankan penurunan fertilitas di Sleman dan daerah sekitarnya.

Jenis Pekerjaan

Grafik Gambar 5 yang ditampilkan menunjukkan distribusi jenis pekerjaan individu di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2023. Kategori pekerjaan yang ditampilkan meliputi petani, nelayan, pedagang, pejabat negara, PNS/TNI/POLRI, swasta, pensiunan, dan pekerja lepas.



Gambar 5. Jenis Pekerjaan Individu di Kabupaten Sleman, 2023 (BKKBN Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Tahun 2023)

Dari grafik Gambar 5, dapat dilihat bahwa kategori pekerjaan di sektor swasta (bar hijau) mendominasi di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Sleman. Kategori ini menunjukkan angka tertinggi, dengan jumlah pekerja di sektor swasta mencapai 20.000 orang di kecamatan-kecamatan seperti Depok, Mlati, dan Gamping. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di wilayah ini, yang mencerminkan dinamika

ekonomi yang bergerak ke arah industrialisasi dan urbanisasi.

Selain itu, kategori petani (bar biru) juga menunjukkan angka yang signifikan, terutama di kecamatan seperti Turi, Cangkringan, dan Pakem. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pergeseran ke arah sektor swasta, pertanian masih menjadi sektor penting, terutama di kecamatan-kecamatan yang mungkin lebih

rural atau memiliki akses yang lebih luas ke lahan pertanian.

Kategori pekerja lepas (bar coklat) juga menempati posisi penting, terutama di kecamatan seperti Gamping, Godean, dan Mlati. Jumlah pekerja lepas yang tinggi bisa mencerminkan tren pekerjaan yang fleksibel dan informal, yang sering kali muncul di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi belum sepenuhnya terserap oleh sektor formal.

Kategori pekerjaan lain seperti PNS/TNI/POLRI (bar biru muda) dan pedagang (bar abu-abu) juga memiliki jumlah yang signifikan, meskipun lebih rendah dibandingkan sektor swasta dan pertanian. Sementara itu, kategori nelayan (bar oranye) dan pejabat negara (bar kuning) memiliki jumlah yang sangat kecil di semua kecamatan, yang dapat dikaitkan dengan kondisi geografis dan struktur administratif daerah tersebut.

Distribusi pekerjaan yang terlihat dalam grafik ini dapat dianalisis melalui lensa teori modernisasi, di mana pergeseran pekerjaan dari sektor agraris (pertanian) ke sektor industri dan jasa (swasta) sering kali dianggap sebagai indikator perkembangan ekonomi ([Inkeles and Smith 1974](#)). Dengan meningkatnya jumlah pekerja di sektor swasta, Kabupaten Sleman mungkin sedang mengalami tahap-tahap awal transformasi ekonomi, di mana pertumbuhan industri dan jasa mulai mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian lokal.

Selain itu, tingginya jumlah pekerja di sektor swasta juga dapat dilihat dari perspektif teori dualisme ekonomi, yang dikemukakan oleh ([Lewis 1954](#)). Teori ini menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sedang berkembang, sektor modern (dalam hal ini, sektor swasta) dan sektor tradisional (seperti pertanian) dapat berdampingan. Keterlibatan signifikan dalam kedua sektor ini di Kabupaten Sleman mengindikasikan adanya perpaduan antara ekonomi modern dan tradisional.

Peningkatan dalam jumlah pekerja lepas juga dapat mencerminkan perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja, di mana pekerjaan yang tidak terikat oleh satu majikan menjadi lebih umum seiring dengan fleksibilitas ekonomi dan perubahan dalam teknologi informasi ([Standing 2011](#)).

Teori modernisasi, sebagaimana dikemukakan oleh ([Inkeles and Smith 1974](#)), menjelaskan bahwa transisi dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa merupakan indikator

perkembangan ekonomi dan modernisasi sosial. Peningkatan jumlah pekerja di sektor swasta di Kabupaten Sleman mencerminkan proses industrialisasi dan urbanisasi yang semakin kuat, di mana daerah seperti Depok dan Mlati, yang berdekatan dengan Yogyakarta, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di sektor formal. Pergeseran ini menunjukkan bahwa masyarakat Sleman semakin terintegrasi dalam ekonomi modern, di mana sektor jasa dan industri menjadi dominan dibandingkan sektor agraris.

Temuan ini menguatkan teori modernisasi, di mana pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian menuju sektor swasta merupakan bagian dari dinamika pembangunan ekonomi daerah. Ini juga menegaskan bahwa sektor swasta memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja di daerah yang mengalami urbanisasi seperti Kabupaten Sleman. Peningkatan pekerjaan di sektor swasta menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan tuntutan sektor industri dan jasa. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pengembangan sektor ini melalui kebijakan yang mendukung investasi dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Teori dualisme ekonomi, ([Lewis 1954](#)) dalam teori dualisme ekonomi menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sedang berkembang, sektor modern (industri dan jasa) dan sektor tradisional (pertanian) dapat berdampingan. Ini terlihat jelas di Sleman, di mana meskipun sektor swasta mendominasi, sektor pertanian tetap penting di beberapa kecamatan rural seperti Turi dan Pakem. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sleman masih berada dalam tahap di mana kedua sektor tersebut berjalan beriringan, dengan masyarakat di daerah rural masih bergantung pada pertanian, sementara daerah perkotaan lebih berfokus pada pekerjaan formal di sektor swasta.

Hasil ini memperkuat relevansi teori dualisme ekonomi, di mana sektor tradisional seperti pertanian masih bertahan di beberapa kecamatan, terutama di wilayah-wilayah yang lebih jauh dari pusat perkotaan. Kehadiran dua sektor ini menunjukkan bahwa modernisasi di Sleman tidak terjadi secara seragam, melainkan tergantung pada tingkat urbanisasi di setiap kecamatan. Dalam konteks ini, pemerintah

daerah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung kedua sektor tersebut. Di satu sisi, perlu ada kebijakan untuk memodernisasi pertanian melalui teknologi pertanian yang lebih efisien, sementara di sisi lain, diperlukan kebijakan untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor swasta di daerah yang lebih urban.

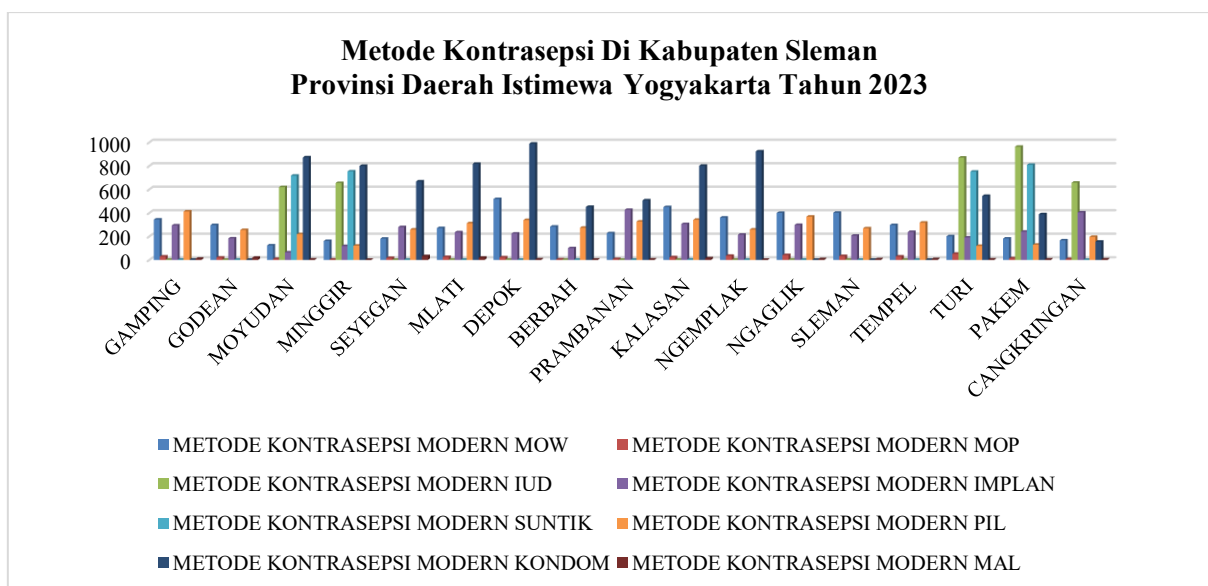
Pekerja lepas dan fleksibilitas pekerjaan, tingginya jumlah pekerja lepas di beberapa kecamatan seperti Gamping dan Mlati menunjukkan tren pekerjaan yang lebih fleksibel dan informal. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perubahan struktural pasar tenaga kerja di mana pekerjaan tetap di sektor formal menjadi semakin kompetitif, sehingga pekerja lebih memilih pekerjaan yang fleksibel. (Standing 2011) menyebut fenomena ini sebagai "prekariat", yaitu kelompok pekerja yang tidak memiliki jaminan kerja tetap dan beroperasi di sektor informal.

Tingginya jumlah pekerja lepas di Kabupaten Sleman memperkuat relevansi teori prekariat yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja modern, terutama di daerah yang sedang berkembang.

Ini menunjukkan bahwa meskipun sektor swasta menyediakan lapangan kerja formal, ada segmen yang signifikan dari populasi yang masih tergantung pada pekerjaan informal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk pekerja lepas dan informal. Ini bisa berupa peningkatan akses terhadap jaminan sosial, layanan kesehatan, serta program pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan stabilitas ekonomi.

Metode Kontrasepsi

Grafik [Gambar 6](#) menampilkan data penggunaan metode kontrasepsi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2023. Berbagai metode kontrasepsi modern yang digunakan oleh masyarakat di setiap kecamatan ditampilkan, termasuk metode sterilisasi perempuan (MOW), sterilisasi laki-laki (MOP), IUD, implan, suntik, pil, kondom, dan metode amenore laktasi (MAL).



Gambar 6. Metode Kontrasepsi di Kabupaten Sleman, 2023 (BKKBN Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Tahun 2023)

Dari grafik [Gambar 6](#), terlihat bahwa metode kontrasepsi modern yang paling banyak digunakan adalah metode kondom, yang ditunjukkan oleh bar berwarna navy. Kecamatan seperti Depok, Ngemplak dan Moyudan menunjukkan angka yang sangat tinggi untuk penggunaan kondom, mencapai hampir 1.000 pengguna di masing-masing

kecamatan. Ini menunjukkan bahwa metode kondom adalah pilihan kontrasepsi yang paling populer di Kabupaten Sleman, mungkin karena kemudahan akses dan efektivitasnya.

Tingginya penggunaan kondom sebagai metode kontrasepsi utama di Kabupaten Sleman dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional, di mana pasangan cenderung memilih

metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi ([Becker 1962](#)). Kondom, yang tidak hanya mencegah kehamilan tetapi juga melindungi dari penyakit menular seksual, mungkin dianggap sebagai pilihan yang praktis dan multifungsi.

Dari perspektif sosiologis, tingginya penggunaan kondom juga dapat mencerminkan keberhasilan program-program kesehatan masyarakat yang menekankan pentingnya perlindungan ganda dan edukasi seksual. Kampanye yang efektif oleh pemerintah dan organisasi kesehatan mungkin telah meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap kondom sebagai metode kontrasepsi yang aman dan efektif ([Cleland, J., Bernstein, S., Ezeh, A., Faundes, A., Glasier, A., & Innis 2006](#)).

Selain itu, teori modernisasi menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan metode kontrasepsi yang beragam, termasuk kondom, menandakan adanya perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi, di mana masyarakat menjadi lebih sadar dan terdidik mengenai opsi-opsi yang tersedia untuk perencanaan keluarga ([Rostow 1960](#)).

Metode kontrasepsi IUD (bar abu-abu) juga menunjukkan angka yang signifikan, terutama di kecamatan seperti Pakem dan Turi, di mana penggunaannya mencapai lebih dari 800 orang. Hal ini mungkin mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap metode jangka panjang yang tidak memerlukan perawatan harian atau mingguan.

Sebaliknya, metode kontrasepsi seperti MOP (bar oranye), MAL (bar kuning), dan MOW (bar hijau tua) menunjukkan penggunaan yang relatif rendah di sebagian besar kecamatan. Penggunaan MOP hampir tidak terlihat di banyak kecamatan, menunjukkan bahwa sterilisasi laki-laki masih kurang diminati dibandingkan dengan metode lainnya.

Selain itu, penggunaan implan (bar kuning) dan pil (bar hijau) juga cukup bervariasi di seluruh kecamatan, dengan kecenderungan yang lebih rendah dibandingkan dengan suntik dan IUD. Ini mungkin disebabkan oleh preferensi pribadi, aksesibilitas, atau pengetahuan tentang metode tersebut.

Penggunaan metode kontrasepsi yang tinggi, terutama suntik dan IUD, dapat dianalisis melalui teori perubahan sosial yang berkaitan dengan modernisasi, di mana peningkatan akses dan penggunaan kontrasepsi dianggap sebagai

bagian dari proses modernisasi yang lebih luas dalam masyarakat ([Rostow 1960](#)). Tingginya angka penggunaan metode suntik juga bisa dikaitkan dengan program pemerintah dan lembaga kesehatan yang aktif mempromosikan metode ini sebagai bagian dari upaya pengendalian kelahiran.

Teori pilihan rasional juga relevan dalam konteks ini, di mana individu atau pasangan cenderung memilih metode kontrasepsi yang dianggap paling cocok dan mudah diakses, berdasarkan informasi dan sumber daya yang tersedia ([Becker 1962](#)). Keputusan untuk memilih metode kondom atau suntik misalnya, mungkin didorong oleh pertimbangan seperti frekuensi penggunaan, kemudahan, dan biaya yang terjangkau.

Distribusi rendah pada metode seperti MOP dan MAL mungkin mencerminkan keterbatasan pengetahuan atau ketidaknyamanan dengan metode tersebut, yang bisa diperbaiki melalui program pendidikan kesehatan yang lebih intensif ([Cleland, J., Bernstein, S., Ezeh, A., Faundes, A., Glasier, A., & Innis 2006](#)).

Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan di Sleman adalah kondom dan suntikan. Penggunaan kontrasepsi yang tinggi ini sejalan dengan teori pilihan rasional ([Becker 1962](#)), di mana pasangan cenderung memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan berdasarkan aksesibilitas, biaya, dan frekuensi penggunaan. Penggunaan kontrasepsi yang tinggi juga mendukung teori modernisasi ([Rostow 1960](#)), yang menyatakan bahwa masyarakat yang lebih modern memiliki akses yang lebih baik ke metode perencanaan keluarga.

Penggunaan kontrasepsi di Sleman mendukung teori pilihan rasional dan modernisasi, di mana pasangan memilih metode kontrasepsi berdasarkan pertimbangan rasional tentang aksesibilitas dan efektivitas. Kampanye kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana perlu terus berfokus pada metode kontrasepsi yang mudah diakses, serta meningkatkan kesadaran tentang risiko dan manfaat metode kontrasepsi modern.

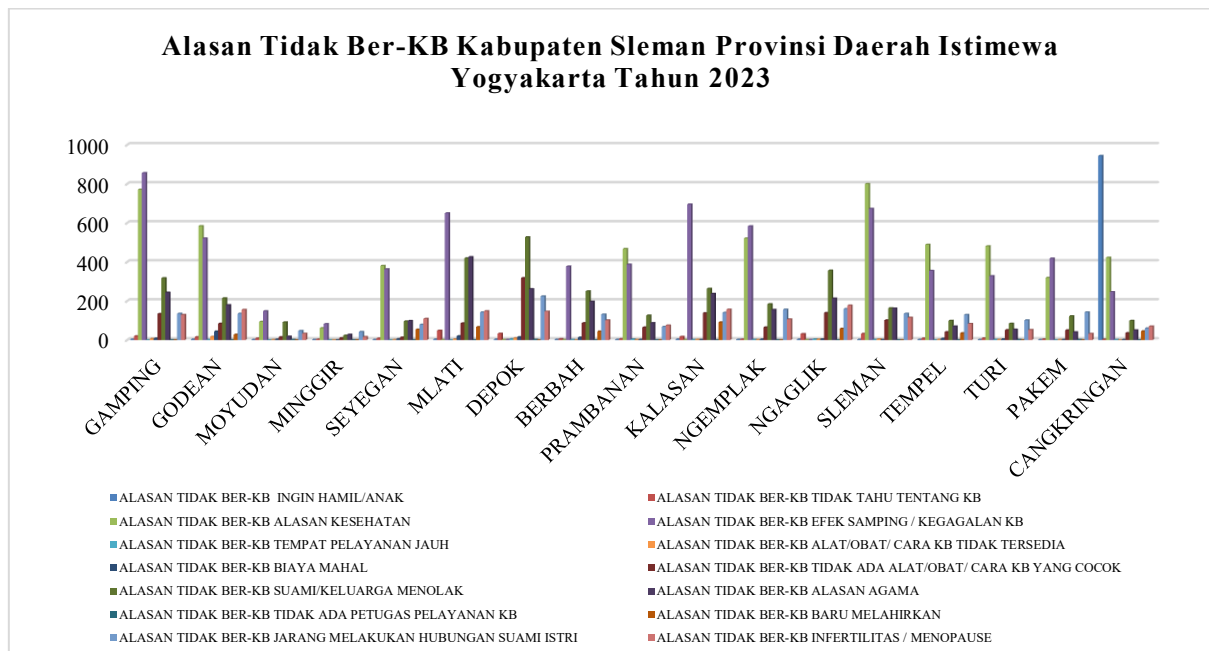
Alasan Tidak Ber-KB

Grafik pada [Gambar 7](#) menampilkan berbagai alasan mengapa penduduk di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak menggunakan metode kontrasepsi (tidak ber-KB) pada tahun 2023.

Data tersebut dipecah menjadi berbagai alasan, termasuk efek samping, keinginan untuk hamil, alasan kesehatan, dan kendala lainnya.

Dari grafik tersebut, alasan yang paling menonjol adalah kekhawatiran tentang efek samping atau kegagalan metode kontrasepsi, yang ditunjukkan oleh bar berwarna kuning. Alasan ini dominan di banyak kecamatan,

terutama di Gamping, Mlati, dan Kalasan, di mana jumlah individu yang menyebutkan efek samping sebagai alasan tidak ber-KB mencapai angka lebih dari 600 orang. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang efek samping, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan, menjadi penghalang utama dalam penggunaan kontrasepsi di wilayah ini.



Gambar 7. Alasan Tidak Ber-KB di Kabuaten Sleman, 2023 (BKKBN Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Tahun 2023)

Selain itu, alasan kesehatan (bar abu-abu) juga muncul sebagai alasan signifikan di beberapa kecamatan seperti Sleman dan Gamping. Alasan ini mungkin mencakup kekhawatiran terhadap kondisi medis tertentu yang dianggap berisiko jika menggunakan metode kontrasepsi.

Sementara itu, keinginan untuk hamil atau memiliki anak (bar biru) dan kurangnya informasi tentang KB (bar oranye) juga muncul di beberapa kecamatan, namun jumlahnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan efek samping dan alasan kesehatan. Misalnya, di Kecamatan Cangkringan, keinginan untuk hamil mendominasi alasan tidak ber-KB, yang menunjukkan adanya kelompok penduduk yang aktif berencana menambah jumlah anak.

Di sisi lain, alasan seperti biaya mahal (bar hijau tua), tempat pelayanan jauh (bar biru muda), dan penolakan dari suami/keluarga (bar cokelat) menunjukkan angka yang lebih rendah dan bervariasi tergantung kecamatan, menandakan bahwa kendala ekonomi dan akses

mungkin tidak sebesar masalah kesehatan atau efek samping dalam hal menghalangi penggunaan kontrasepsi.

Alasan dominannya kekhawatiran terhadap efek samping dapat dijelaskan melalui teori persepsi risiko yang dikemukakan oleh (Slovic 1987). Menurut teori ini, persepsi individu terhadap risiko, terutama dalam konteks kesehatan, sangat dipengaruhi oleh informasi yang terima dan pengalaman pribadi atau orang di sekitar. Persepsi yang berlebihan atau salah mengenai efek samping kontrasepsi dapat menyebabkan ketakutan yang tidak proporsional, yang akhirnya menghambat adopsi KB.

Selain itu, teori hambatan psikologis dan sosial dari (Ajzen & Fishbein 1980) juga relevan, di mana ketakutan terhadap efek samping dapat menjadi hambatan psikologis yang kuat, bahkan jika manfaat dari kontrasepsi jelas dan dapat diakses. Hambatan ini bisa diatasi dengan program pendidikan kesehatan yang lebih intensif, yang tidak hanya fokus pada

manfaat kontrasepsi tetapi juga menangani mitos dan kesalahpahaman yang ada di masyarakat.

Teori aksesibilitas layanan kesehatan dari [\(Andersen 1995\)](#) juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana alasan kesehatan dan efek samping bisa menjadi penghalang. Akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas dapat memperburuk kekhawatiran ini, karena kurangnya konsultasi yang memadai dan informasi yang akurat dari tenaga kesehatan.

Alasan utama tidak menggunakan kontrasepsi di Sleman adalah kekhawatiran akan efek samping. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori persepsi risiko [\(Slovic 1987\)](#), yang menyatakan bahwa keputusan seseorang dipengaruhi oleh persepsi terhadap risiko yang sering kali didasarkan pada informasi yang salah atau kurang memadai. Selain itu, teori hambatan psikologis dan sosial [\(Ajzen & Fishbein 1980\)](#) juga relevan, di mana ketakutan akan risiko dapat menjadi penghalang adopsi kontrasepsi.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya teori persepsi risiko dalam memahami keputusan fertilitas, di mana persepsi terhadap risiko kesehatan memainkan peran besar dalam adopsi metode kontrasepsi. Pemerintah dan organisasi kesehatan harus meningkatkan edukasi publik terkait keamanan metode kontrasepsi, serta menekankan pentingnya konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat.

Dengan hubungan erat antara hasil penelitian ini dengan teori dasar yang telah dijelaskan, penelitian ini tidak hanya memperkuat validitas teori-teori yang digunakan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang signifikan untuk pengembangan kebijakan terkait keluarga berencana, pendidikan, dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Sleman.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai berbagai aspek demografis di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pola fertilitas dan preferensi keluarga di wilayah tersebut. Pergeseran usia kawin pertama yang terjadi di Sleman, di mana mayoritas perempuan menikah di atas usia 19 tahun, mencerminkan dampak

langsung dari meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesadaran akan pentingnya stabilitas ekonomi sebelum membangun keluarga. Ini sejalan dengan teori modernisasi, di mana pendidikan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik sering kali menunda keputusan untuk menikah. Penundaan usia pernikahan ini juga menegaskan adanya peningkatan aspirasi sosial di kalangan perempuan terkait pengembangan diri dan karier, yang pada gilirannya berpengaruh pada penurunan angka kelahiran.

Preferensi keluarga kecil dengan dua anak yang dominan di hampir seluruh kecamatan di Sleman menunjukkan bahwa nilai keluarga ideal yang dianjurkan oleh program keluarga berencana nasional telah mengakar kuat di masyarakat. Konsep dua anak sebagai jumlah ideal tidak hanya mencerminkan keberhasilan program pemerintah, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran yang lebih besar akan pentingnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak-anak. Hal ini berhubungan dengan tren global di mana keluarga semakin memprioritaskan kualitas hidup, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dibandingkan dengan memiliki banyak anak.

Selain itu, temuan tentang jumlah anak lahir hidup yang sebagian besar berada pada angka satu atau dua juga mendukung gagasan bahwa keluarga di Sleman lebih cenderung memilih untuk membatasi jumlah anak. Ini sejalan dengan perubahan sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk fokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga kecil. Preferensi ini tidak hanya menggambarkan tren fertilitas yang menurun, tetapi juga menunjukkan bahwa keluarga di Sleman beradaptasi dengan tuntutan ekonomi modern, di mana membesarkan anak dengan kualitas hidup yang baik memerlukan sumber daya yang cukup besar.

Tingkat pendidikan yang tinggi di Kabupaten Sleman, di mana mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA) dan sejumlah besar telah melanjutkan ke pendidikan tinggi, menjadi faktor kunci dalam penurunan fertilitas dan pergeseran preferensi keluarga. Pendidikan yang lebih tinggi, terutama bagi perempuan, secara langsung berhubungan dengan penundaan usia pernikahan dan keputusan untuk memiliki lebih sedikit anak. Ini

mendukung teori modal manusia yang menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang meningkatkan produktivitas individu serta meningkatkan kesadaran tentang pilihan reproduktif yang lebih rasional dan terencana.

Dalam hal jenis pekerjaan, sektor swasta menjadi dominan di Kabupaten Sleman, sementara sektor pertanian tetap signifikan di beberapa kecamatan rural. Kondisi ini mencerminkan dualisme ekonomi, di mana sektor modern dan tradisional masih berjalan berdampingan. Di satu sisi, pertumbuhan sektor swasta yang pesat di wilayah urban menandai adanya transformasi ekonomi menuju modernisasi. Di sisi lain, sektor pertanian tetap menjadi sumber penghidupan penting di wilayah rural. Fenomena ini mendukung teori dualisme ekonomi yang menggambarkan koeksistensi antara ekonomi modern dan tradisional dalam satu wilayah yang sedang berkembang.

Penggunaan metode kontrasepsi modern seperti suntik dan kondom juga menonjol di Sleman, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga. Namun, kekhawatiran terhadap efek samping metode kontrasepsi menjadi penghalang utama bagi beberapa penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menyoroti kebutuhan akan edukasi kesehatan reproduksi yang lebih komprehensif, untuk menjawab mitos dan ketakutan yang tidak berdasar mengenai efek samping kontrasepsi. Tingginya angka ketakutan terhadap efek samping juga mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang perlu diatasi melalui kampanye kesehatan yang lebih efektif dan interaktif.

Akhirnya, alasan utama yang menyebabkan penduduk tidak menggunakan alat kontrasepsi di Sleman adalah ketakutan akan efek samping, serta adanya masalah kesehatan dan keinginan untuk hamil. Hal ini menunjukkan bahwa program intervensi kesehatan perlu fokus pada peningkatan akses terhadap informasi yang akurat tentang metode kontrasepsi, serta menangani mitos yang beredar di masyarakat terkait dengan kegagalan dan risiko metode kontrasepsi. Selain itu, penyediaan layanan kesehatan yang lebih ramah dan inklusif bagi pengguna kontrasepsi harus ditingkatkan, sehingga lebih banyak penduduk dapat merasakan manfaat dari program keluarga berencana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan pendidikan di Kabupaten Sleman sangat mempengaruhi keputusan reproduktif dan pola fertilitas masyarakatnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, kebijakan yang lebih efektif dapat dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan keluarga, dan penurunan angka kelahiran yang sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

SARAN

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sleman telah mengalami banyak kemajuan dalam pendidikan dan akses ke layanan kesehatan, masih ada tantangan signifikan terkait persepsi risiko dan akses terhadap informasi kesehatan yang akurat. Oleh karena itu, program-program intervensi kesehatan dan pendidikan harus ditingkatkan, terutama dalam hal penyebaran informasi yang tepat mengenai manfaat dan risiko metode kontrasepsi, serta pentingnya pendidikan dan perencanaan keluarga dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, dan program keluarga berencana yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen & Fishbein. 1980. "Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior." *Prentice-Hall*.
- Andersen. 1995. "Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care: Does It Matter?" *Journal of Health and Social Behavior* 36(1): 1–10.
- Balbo, N., Billari, F. C., & Mills, M. 2013. "Fertility in Advanced Societies: A Review of Research." *European Journal of Population* 29(1): 1–38.
- Becker. 1960. "An Economic Analysis of Fertility." *In Demographic and Economic Change in Developed Countries*: 209–40.
- Becker. 1962. "Irrational Behavior and

- Economic Theory.” *Journal of Political Economy* 70(1): 1–13.
- Becker. 1964. “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.” *University of Chicago Press*.
- Becker, G. S. 1981. “A Treatise on the Family.” *Harvard University Press*.
- Bernardi. 2016. “The Impact of Educational Attainment on Family Formation: New Evidence from the Generations and Gender Survey.” *Demographic Research* (35): 1081–1110.
- BKKBN. 2020. “Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.” In *Laporan Tahunan BKKBN*.
- Bongaarts, J. 1978. “A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility.” *Population and Development Review* 4(1): 105–32.
- Bongaarts, J. 2017. “The Effect of Fertility Decline on Population Growth: A Macroeconomic Perspective.” *Population and Development Review* 43(S1): 20–40.
- Caldwell, J. C. 1982. Academic Press *Theory of Fertility Decline*.
- Casterline, J. B., & Trussell, J. 1980. “Age at First Birth.” In R. L. Repetto (Ed.), *Economic Demography University of Chicago Press*: 59–77.
- Central Bureau of Statistics. 2022. *Kabupaten Sleman in Figures*.
- Cleland, J., Bernstein, S., Ezeh, A., Faundes, A., Glasier, A., & Innis, J. 2006. “Family Planning: The Unfinished Agenda.” *The Lancet* 368(9549): 1810–27.
- Dyson. 2010. “Population and Development: The Demographic Transition.” In *Zed Books*.
- Esping-Andersen. 2009. Polity Press *The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles*.
- Firman. 2018. “Population Dynamics and Urbanization: Indonesia’s Changing Demographics.” *Regional Development Studies* 24(1): 33–45.
- Goldscheider and Lappegard. 2015. “The Gender Revolution: A Framework for Understanding Changing Family and Demographic Behavior.” *Population and Development Review* 41(1): 207–39.
- Goode. 1963. “World Revolution and Family Patterns.” *Free Press*.
- Gubhaju. 2019. “Factors Influencing the Fertility Decline in Southeast Asia.” *Asian Population Studies* 15(3): 213–28.
- Hull. 2021. “Indonesia’s Fertility Transition: Trends, Determinants, and Implications.” *Journal of Southeast Asian Economies* 38(2): 187–205.
- Inkeles and Smith. 1974. “Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries.” *Harvard University Press*.
- Jayaweera & Mishra. 2020. “Exploring Fertility Decline in Urban Settings: Dynamics and Determinants in Southeast Asia.” *Population Studies Journal* 74(3): 215–30.
- Jones, G., & Gubhaju, B. 2017. “Factors Influencing Fertility Decline in Indonesia.” *Asian Demographics Review* 9(1): 59–75.
- Kemdikbud. 2019. “Kebijakan Pendidikan Nasional: Akses, Mutu, Dan Relevansi.” *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Kirk. 1996. “Demographic Transition Theory.” *Population Studies* 50(3): 361–87.
- Kohler, H. P., Billari, F. C., & Ortega, J. A. 2006. “Low Fertility in Europe: Causes, Implications, and Policy Options.” *Demographic Research* 19(3): 1–38.
- Lesthaeghe. 2010. “The Unfolding Story of the Second Demographic Transition.” *Population and Development Review* 36(2): 211–51.

- Lewis. 1954. "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour." *The Manchester School*.
- Lutz, W., Testa, M. R., & Penn, D. J. 2006. *Vienna Yearbook of Population Research, The Low Fertility Trap Hypothesis: Forces That May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe*.
- Martin, L. G. 1995. "The Women's Movement and Family Size: A Study of Modern Trends in Fertility Behavior." *Population Studies* 49(3): 339–58.
- McDonald. 2020. "Fertility Rates in Urban Asia: Trends and Implications." *Asia-Pacific Population Journal* 35(1): 45–64.
- McNicoll, G. 1994. "Institutional Analysis of Fertility." *Population and Development Review* 20(3): 579–606.
- Mincer. 1963. "Market Prices, Opportunity Costs, and Income Effects." *Stanford University Press*: 67–82.
- Morgan and Tailor. 2006. "Low Fertility at the Turn of the Twenty-First Century." *Annual Review of Sociology* (32): 375–99.
- Notestein. 1953. "Economic Problems of Population Change." *Proceedings of the Eighth International Conference of Agricultural Economists*: 13–31.
- Rostow. 1960. "The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto." *Cambridge University Press*.
- Slovic. 1987. "Perception of Risk. Science." *Science* 236(4799): 280–85.
- Standing. 2011. "The Precariat: The New Dangerous Class." *Bloomsbury Academic*.
- Sugiharjo. 2000. "Kebijakan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Di Indonesia." *PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Sullivan. 2019. "Demographic Challenges in Southeast Asia." *Demographic Research* 40: 165–84.
- UNFPA. 2019. "State of the World Population 2019: Unfinished Business—the Pursuit of Rights and Choices for All." *New York: United Nations Population Fund*.